

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN  
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PADA KAWASAN KOTA  
TUA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi  
Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**OLEH:**

**Hanifa Azzahra**

**2110843022**

**Dibimbing Oleh:**

**Dosen Pembimbing I : Rozidateno Putri Hanida, S.IP., M.PA**

**Dosen Pembimbing II : Ilham Aldelano Azre, S.IP, MA**

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL  
DAN ILMU POLITIK UNUVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

## ABSTRAK

**Hanifa Azzahra, 2110843022, Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya pada Kawasan Kota Tua Padang, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2026. Dibimbing oleh: Rozidateno Putri Hanida, S.IP., M.PA dan Ilham Aldelano Azre, S.IP., MA.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya di Kawasan Kota Tua Padang. Studi ini dilatarbelakangi oleh adanya diskrepansi antara regulasi normatif dengan realitas empiris, yang ditandai dengan banyaknya bangunan cagar budaya yang rusak, tidak terawat, serta pemanfaatannya yang menyimpang dari ketentuan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara bersama informan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Ahli Cagar Budaya, Pengelola Kawasan Kota Tua, Dinas PUPR, hingga elemen masyarakat terkait.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum mencapai hasil optimal akibat beberapa hambatan utama, seperti standar dan tujuan kebijakan yang belum terukur secara jelas, keterbatasan sumber daya manusia, serta pola komunikasi antarorganisasi yang belum efektif. Selain itu, rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat, serta kurangnya dukungan politik dan kondisi sosial yang kondusif, turut menghambat keberhasilan program. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan yang komprehensif pada aspek teknis dan koordinasi instansi, sekaligus peningkatan kesadaran publik agar upaya pelestarian kawasan cagar budaya di Kota Padang dapat terlaksana dengan lebih efektif.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Cagar Budaya, Kota Tua Padang, Pelestarian**



## ABSTRACT

**Hanifa Azzahra, 2110843022, The Implementation of Padang City Regional Regulation Number 11 of 2019 concerning the Management and Preservation of Cultural Heritage in the Old Town Area of Padang, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Andalas, Padang, 2026. Supervised by: Rozidateno Putri Hanida, S.IP., M.PA and Iham Aldelano Azre, S.IP., MA.**

This study aims to analyze the implementation of Padang City Regional Regulation Number 11 of 2019 concerning the Management and Preservation of Cultural Heritage in the Padang Old Town area. The research is driven by the discrepancy between normative regulations and empirical conditions, where many heritage buildings remain damaged, poorly maintained, or utilized in ways that violate existing provisions. Using a qualitative descriptive method, data were gathered through interviews, observations, and documentation involving informants from the Department of Education and Culture, the Cultural Heritage Expert Team, the Padang Old Town Management, the Department of Public Works and Public Housing, and relevant community members.

The results indicate that policy implementation has not been optimal, influenced by several factors: unclear and immeasurable policy standards and objectives, limited human resources, ineffective inter-organizational communication, and low levels of community understanding and participation. Furthermore, social conditions and political support have not fully bolstered the maximum execution of the policy. Consequently, improvements in technical aspects, coordination, and public awareness are essential to ensure that cultural heritage preservation policies can be implemented more effectively.

**Keywords: Policy Implementation, Cultural Heritage, Old Town Padang**

